

## Pendidikan, Isu HAM, dan Gender Disparities

Yadi Heryadi<sup>1</sup>, Satiri<sup>2</sup>, Suherman<sup>3</sup>, Sholih<sup>4</sup>

Universitas Setia Budhi Rangkasbitung<sup>1</sup>

SMAN 1 Jawilan<sup>2</sup>

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa<sup>3,4</sup>

Alamat e-mail : [heryadi.yadi07@gmail.com](mailto:heryadi.yadi07@gmail.com) , [satiriari72@gmail.com](mailto:satiriari72@gmail.com) ,  
[prof.suherman14@gmail.com](mailto:prof.suherman14@gmail.com), [sholih@untirta.ac.id](mailto:sholih@untirta.ac.id)

### Abstrak

Pendidikan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan ketidaksetaraan gender adalah tiga isu penting yang saling terkait dalam konteks pembangunan sosial dan kemanusiaan di Indonesia. Makalah ini menyajikan analisis tentang hubungan antara ketiga isu tersebut serta upaya untuk mengatasi tantangan yang terkait. Pada bagian pendidikan, makalah ini membahas gambaran umum tentang sistem pendidikan Indonesia, menyoroti tantangan aksesibilitas, kekurangan sumber daya, hambatan bahasa, dan disparitas kualitas pendidikan. Kemudian, analisis dilakukan terhadap isu HAM dalam konteks pendidikan, termasuk hak atas pendidikan yang layak dan upaya untuk mempromosikan hak-hak tersebut melalui kebijakan dan inisiatif pemerintah serta masyarakat. Selanjutnya, makalah membahas ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, menyoroti hambatan akses, disparitas dalam kesempatan pendidikan, serta upaya pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. Berbagai studi kasus dan tindakan sukses juga disajikan untuk mengilustrasikan upaya nyata dalam mengatasi tantangan-tantangan ini. Dengan menganalisis ketiga isu ini secara holistik, makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dan interkoneksi antara pendidikan, isu HAM, dan ketidaksetaraan gender, serta untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua warga Indonesia, tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang sosial, atau keberagaman lainnya.

Kata Kunci: Pendidikan, Isu HAM, Gender Disparities.

### Abstract

Education, Human Rights (HAM), and gender inequality are three important issues that are interrelated in the context of social and humanitarian development in Indonesia. This paper

presents an analysis of the relationship between these three issues as well as efforts to overcome related challenges. In the education section, this paper discusses an overview of the Indonesian education system, highlighting the challenges of accessibility, lack of resources, language barriers, and disparities in education quality. Then, an analysis is carried out on human rights issues in the context of education, including the right to adequate education and efforts to promote these rights through government and community policies and initiatives. Next, the paper discusses gender inequality in education, highlighting barriers to access, disparities in educational opportunities, as well as efforts to empower women through education. Various case studies and successful actions are also presented to illustrate concrete efforts in overcoming these challenges. By analyzing these three issues holistically, this paper aims to provide a better understanding of the complexity and interconnection between education, human rights issues, and gender inequality, as well as to identify effective strategies in improving access and quality of education for all Indonesian citizens, regardless of age, gender, social background, or other diversity.

Keywords: Education, Human Rights Issues, Gender Disparities.

## **PENDAHULUAN**

Sistem pendidikan Indonesia memiliki tantangan seperti aksesibilitas yang tidak merata, kekurangan sumber daya, dan disparitas kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Salah satunya adanya Hak atas pendidikan yang layak adalah hak asasi manusia. Dengan ini harusnya pemerintah dan masyarakat perlu memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Kemudian adanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Perempuan sering menghadapi hambatan akses dan kesempatan pendidikan yang tidak setara dengan laki-laki. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan adalah langkah penting.

Selain itu HAM mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat. Pemerintah harus memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak ini. Ketidaksetaraan gender terjadi dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan. Upaya pemberdayaan perempuan melalui pendidikan harus diperkuat. Pendidikan memiliki peran krusial dalam pemenuhan hak

asasi manusia (HAM), terutama hak atas pendidikan yang layak. Pendidikan yang merata dan inklusif memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan. Ini mencakup anak-anak, remaja, dan orang dewasa dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Hak atas pendidikan yang layak berarti bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi.

Perlu kita sadari juga bahwa pendidikan adalah fondasi bagi pemahaman tentang hak-hak asasi manusia lainnya. Tanpa pendidikan, individu mungkin tidak menyadari hak-hak mereka atau bagaimana melindunginya. Pendidikan mengajarkan nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia, yang merupakan prinsip-prinsip HAM. Pendidikan memberdayakan individu untuk mengambil peran aktif dalam masyarakat. Oleh karena itu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan, seseorang dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memperjuangkan hak-haknya. Pendidikan juga membantu mengurangi ketidaksetaraan dan memperkuat posisi individu yang rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Pendidikan melindungi individu dari penindasan dan eksploitasi. Dengan memahami hak-hak mereka, individu dapat melawan pelanggaran HAM dan meminta perlindungan hukum. Pendidikan juga mengajarkan tentang tanggung jawab dan kewajiban terhadap hak-hak orang lain

## **METODE**

Dalam artikel ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Analisis Literatur. Analisis literatur ini melibatkan makalah, Jurnal, dan penelitian yang membahas pendidikan, HAM dan ketidaksetaraan gender di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan, yaitu metode yang menggunakan studi literatur terhadap berbagai bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan sekunder lanjutan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan mengaitkan bahan hukum dengan isu dan permasalahan yang diteliti. Setelah data terkumpul, peneliti menerapkan Metode Analisis Data Kualitatif. Data sekunder yang terkumpul dianalisis mulai dari konten materi, penjelasan dalam data sekunder, hingga literatur terkait. Analisis ini bertujuan untuk menghubungkan data dengan isu dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum tentang Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan Indonesia mencakup berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Berikut ini adalah uraian mengenai beberapa aspek utama dalam gambaran umum tentang sistem pendidikan di Indonesia: 1) Tingkat Pendidikan: Sistem pendidikan Indonesia terdiri dari beberapa tingkat, termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Setiap tingkat memiliki kurikulum dan struktur pendidikan yang berbeda. 2) Kurikulum: Kurikulum pendidikan di Indonesia diatur oleh pemerintah pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kurikulum ini mencakup berbagai mata pelajaran, seperti bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, dan agama. Selain itu, terdapat juga mata pelajaran tambahan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing. 3) Sekolah Negeri dan Swasta: Sistem pendidikan Indonesia terdiri dari sekolah negeri (milik pemerintah) dan sekolah swasta (milik masyarakat atau lembaga swasta). Sekolah negeri umumnya mendapatkan pendanaan dari pemerintah dan seringkali memiliki biaya pendidikan yang lebih terjangkau, sementara sekolah swasta biasanya memungut biaya pendidikan yang lebih tinggi. 4) Tenaga pendidik di Indonesia terdiri dari guru-guru yang dipekerjakan oleh pemerintah maupun oleh sekolah swasta. Mereka harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk pendidikan formal dan sertifikasi sebagai guru. 5) Fasilitas dan Infrastruktur: Fasilitas pendidikan di Indonesia bervariasi, tergantung pada lokasi dan status sekolah. Sekolah-sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih baik, seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Namun, di daerah pedesaan atau terpencil, fasilitas tersebut mungkin terbatas. 6) Aksesibilitas: Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan di seluruh negeri, masih terdapat tantangan dalam hal akses terhadap pendidikan di daerah pedesaan, pulau-pulau terpencil, dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Pendidikan di Indonesia memiliki sejumlah aspek yang menarik perhatian. Kebijakan pendidikan Indonesia didesain untuk mempromosikan inklusivitas dengan memberikan akses

kepada siswa minoritas untuk menghadiri sekolah umum, serta mengintegrasikan materi multikultural dalam kurikulum, sambil tetap mempertahankan karakteristik budaya Indonesia yang khas (Dahris Siregar et al., 2023). Namun, pendidikan kejuruan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti fasilitas yang tidak memadai, kurangnya pelatihan bagi guru-guru, dan minimnya dukungan dari industri. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan regulasi yang jelas mengenai peran industri agar dapat meningkatkan kompetensi lulusan dan memperbaiki prospek pekerjaan mereka (Suharno et al., 2020). Selain itu, pendidikan bahasa Inggris di Indonesia juga menemui tantangan besar, terutama karena keberagaman kebijakan pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai sosial budaya yang mempengaruhi praktik dan penelitian di dalamnya (Altuzarra, 2021). Implementasi kebijakan pendidikan yang efektif membutuhkan penetapan tujuan yang rinci, program tindakan yang komprehensif, dan dana yang cukup untuk mencapai tujuan pendidikan untuk semua (Shudueva et al., 2023). Sementara itu, pendidikan geografi di Indonesia berusaha mempromosikan keberlanjutan dengan memadukan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembelajaran, serta memanfaatkan metode pembelajaran di luar ruangan dan kearifan lokal (Sibarani & Sinamo, 2020). Selain itu, perbedaan antara pendidikan di Indonesia dan di Jepang sangat mencolok dalam beberapa aspek kunci, termasuk pendidikan internasional, pendidikan karakter, etika, disiplin, dan ragam bidang studi (Sulton, 2020). Kendati demikian, perhatian juga terfokus pada pendidikan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Australia yang mengalami penurunan, sementara pendidikan tinggi di Indonesia menawarkan pengembalian investasi yang tinggi meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengimbangi biaya pendidikan (Septiono, 2023). Di samping itu, upaya pendidikan kewirausahaan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, menekankan pentingnya mentoring untuk meningkatkan keterlibatan siswa, sementara mahasiswa internasional di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk adaptasi budaya dan perbedaan sistem pendidikan serta kesehatan (Nurman et al., 2022). Dengan demikian, pendidikan di Indonesia adalah bidang yang dinamis dan kompleks, dengan tantangan dan potensi yang perlu diperhatikan secara serius. Gambaran umum tentang sistem pendidikan ini memberikan pemahaman dasar tentang struktur, kurikulum, tenaga pendidik, fasilitas, dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia. Dengan memahami aspek-aspek ini, kita

dapat mengevaluasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua anak di Indonesia.

### **Tantangan dan Kesempatan dalam Pendidikan di Indonesia**

Pendidikan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi, tetapi juga memberikan peluang untuk perbaikan yang signifikan. Berikut adalah uraian tentang tantangan dan kesempatan dalam pendidikan di Indonesia. Tantangan: 1) Aksesibilitas: meskipun upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan telah dilakukan, masih terdapat daerah-daerah terpencil dan masyarakat marginal yang kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. 2) Kualitas Pendidikan, meskipun terdapat berbagai sekolah dan lembaga pendidikan di Indonesia, kualitas pendidikan sering kali tidak merata di seluruh negeri. Banyak sekolah di daerah pedesaan atau terpencil menghadapi tantangan dalam menyediakan kurikulum yang berkualitas, guru yang terlatih dengan baik, dan fasilitas yang memadai. 3) Disparitas Sosial-Ekonomi, antara wilayah-wilayah perkotaan dan pedesaan memengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas karena keterbatasan sumber daya. 4) Tenaga Pendidik, masih terdapat kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas, terutama di daerah terpencil. Hal ini dapat memengaruhi kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 5) Keterbatasan Infrastruktur, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, seperti ruang kelas yang sempit, fasilitas olahraga yang minim, dan laboratorium yang tidak lengkap, merupakan tantangan utama dalam menyediakan lingkungan belajar yang kondusif.

Kesempatan: 1) Teknologi Pendidikan, kemajuan teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pemanfaatan teknologi seperti pembelajaran daring dan aplikasi pembelajaran dapat membantu mengatasi kendala geografis dan meningkatkan interaktifitas dalam pembelajaran. 2) Program Pemberdayaan Masyarakat, berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses pendidikan. 3) Reformasi Kurikulum, pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan

kolaborasi, dapat meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan.

### **Kekurangan Sumber Daya dalam Pendidikan**

Kekurangan sumber daya dalam pendidikan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek kekurangan sumber daya dalam pendidikan: 1) Bahan Ajar, banyak sekolah di Indonesia menghadapi kekurangan buku teks dan bahan ajar lainnya yang mutakhir dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Hal ini dapat memengaruhi kualitas pembelajaran siswa. 2) Tenaga Pendidik, masih terdapat kekurangan guru yang berkualitas dan terlatih dengan baik, terutama di daerah terpencil. Kekurangan ini dapat memengaruhi efektivitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 3) Fasilitas Fisik, banyak sekolah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, menghadapi kekurangan infrastruktur dan fasilitas fisik yang memadai. Ruang kelas yang sempit, fasilitas sanitasi yang buruk, dan laboratorium yang tidak lengkap adalah contoh dari kekurangan ini. 4) Teknologi Pendidikan, akses terhadap teknologi pendidikan, seperti komputer dan internet, masih terbatas di beberapa sekolah. Hal ini dapat menghambat penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran.

Tantangan dalam menerapkan teknologi blockchain di pendidikan mencakup masalah terkait hukum perlindungan data, skalabilitas, dan adopsi pasar serta inovasi (Prakoso et al., 2023). Demikian pula, pendidikan tinggi selama pandemi COVID-19 telah mengidentifikasi 28 tantangan dan 24 peluang, yang dikategorikan ke dalam enam area analisis sumber daya (Ferdinan Manuel, 2021). Dengan demikian, penerapan blockchain dalam pendidikan terhambat oleh regulasi, teknis, dan tantangan terkait pasar, sementara pandemi telah membawa lanskap tantangan dan peluang yang kompleks dalam pendidikan tinggi di berbagai domain sumber daya.

Pendidikan Buddha di dunia postmodern menawarkan sejumlah peluang dan tantangan yang harus diatasi dan dioptimalkan secara strategis (Morfi et al., 2023). Demikian pula, lanskap pendidikan yang lebih luas menampilkan tantangan dan peluang yang tak terpisahkan, dengan tantangan sering berasal dari kompetisi antar sekolah dan peluang muncul dari inisiatif

pemimpin visioner yang mencari perubahan transformatif (Syahputra Al Idrus et al., 2023). Akibatnya, pendidikan Buddha dan pendidikan umum menghadapi tantangan dan peluang yang kompleks dan saling terkait, yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk menavigasi persaingan dan memanfaatkan inovasi yang dipimpin oleh kepemimpinan.

Sistem pendidikan tinggi di India menghadapi tantangan kritis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan memedefinisikan peran perguruan tinggi untuk memenuhi tuntutan milenium baru (Liu et al., 2020). Secara bersamaan, integrasi teknologi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan terhalang oleh akses teknologi yang terbatas, kurangnya literasi digital, dan potensi memperburuk ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang ada (Huet et al., 2020). Mengatasi isu-isu multifaset ini memerlukan strategi komprehensif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas institusional, sambil juga memajukan adopsi teknologi dan literasi digital untuk mendorong hasil pendidikan yang adil dan berkelanjutan. Untuk mengatasi kekurangan sumber daya dalam pendidikan, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan, peningkatan pelatihan guru, penyediaan bahan ajar yang berkualitas, dan peningkatan infrastruktur pendidikan.

### **Hambatan Bahasa dalam Pendidikan**

Hambatan bahasa dalam pendidikan menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki beragam bahasa daerah. Berikut adalah beberapa hambatan bahasa dalam pendidikan: 1) Bahasa Pengantar, penggunaan bahasa pengantar yang tidak dikuasai oleh siswa dapat menghambat pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya prestasi akademik siswa, 2) kurangnya materi pembelajaran dalam bahasa local. 3) Komunikasi, bahasa yang tidak dikuasai oleh siswa juga dapat menjadi hambatan dalam komunikasi dengan guru dan teman sekelas, menghambat interaksi sosial dan pembelajaran kolaboratif. Untuk mengatasi hambatan bahasa dalam pendidikan, diperlukan upaya seperti penyediaan materi pembelajaran dalam bahasa yang dikenali oleh siswa, pelatihan bahasa bagi guru, dan promosi multibahasa dan budaya dalam lingkungan pendidikan.

### **Isu Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu secara alami dan universal, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Hak-hak ini termasuk hak atas kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dan martabat manusia. Pentingnya HAM terletak pada perlindungan dan penghormatan terhadap kehidupan, kebebasan, dan martabat setiap individu, serta menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki posisi dan peran yang khas dalam kerangka konstitusi Indonesia, dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia melalui kemitraan kolaboratif dengan masyarakat (Hasdiana, 2018). Selain itu, materi pendidikan hak asasi manusia dari Viktif HAM menunjukkan validitas dan efektivitas yang signifikan dalam mencapai tujuan pembelajaran untuk pendidikan hak asasi manusia (Hawa et al., 2021). Dengan demikian, Komnas HAM, dengan status dan fungsi khususnya dalam kerangka konstitusi Indonesia, berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia melalui keterlibatan masyarakat, sementara sumber daya instruksional dari Viktif HAM berperan sebagai alat berharga untuk mencapai tujuan pendidikan hak asasi manusia.

Komnas HAM memegang peran penting dalam perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia di Indonesia, yang membutuhkan dukungan pemerintah yang lebih besar dan kesadaran publik untuk pelaksanaan tugasnya yang optimal (Li (Michael) & Wong, 2023). Meskipun memiliki fungsi sentral dalam kerangka hak asasi manusia negara tersebut, Komnas HAM menghadapi tantangan terhadap independensinya akibat pengaruh pemerintah dan ketergantungan pada perspektif Pancasila, Konstitusi, dan Kebudayaan (Ashar Hasanuddin, 2021). Dengan demikian, meskipun Komnas HAM tetap berperan dalam menjaga hak asasi manusia, efektivitasnya bergantung pada dukungan pemerintah yang lebih kuat dan kesadaran publik, di tengah kekhawatiran akan independensinya yang dipengaruhi oleh faktor pemerintah dan ideologis. Untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, penting untuk memperkuat Komnas HAM dan meningkatkan koordinasinya dengan Komnas Perempuan dan KPAI (Bramantyo et al., 2023). Mengingat otoritasnya untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, Komnas HAM menekankan perlunya penyelidikan

yang tepat waktu untuk mencegah pelanggaran di masa depan, menyoroti pentingnya kolaborasi yang diperkuat dengan Komnas Perempuan dan KPAI untuk memperkuat perlindungan dan penerapan hak asasi manusia di seluruh negeri.

### **Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia**

Pendidikan dianggap sebagai hak asasi manusia yang fundamental karena memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak lainnya. Pendidikan memberikan akses ke pengetahuan, keterampilan, dan peluang yang diperlukan untuk meraih potensi penuh individu. Hak atas pendidikan dijamin oleh berbagai instrumen HAM internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Isu-isu HAM dalam Konteks Pendidikan di Indonesia, 1) Diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, seperti etnis, agama, dan gender, dapat terjadi dalam akses dan pelayanan pendidikan. 2) Hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan, masih sering kali diabaikan atau dilanggar. 3) Kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosioekonomi, merupakan tantangan serius dalam mewujudkan hak atas pendidikan bagi semua individu. 4) Kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalam ruang lingkungan pendidikan, masih terkadang dibatasi atau ditekan.

### **Inisiatif Pemerintah dan Masyarakat dalam Mempromosikan HAM melalui Pendidikan**

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mempromosikan HAM melalui pendidikan, antara lain: 1) Penyusunan Kebijakan: Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memastikan pemenuhan hak-hak pendidikan, termasuk kebijakan tentang pendidikan inklusif, akses pendidikan bagi anak-anak difabel, dan perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan. 2) Program Pendidikan: Berbagai program pendidikan telah diluncurkan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 3) Kampanye Kesadaran: Masyarakat sipil, LSM, dan lembaga swadaya masyarakat turut berperan dalam mengkampanyekan pentingnya HAM dalam pendidikan, termasuk melalui penyuluhan,

pelatihan, dan advokasi. Melalui upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pemenuhan hak asasi manusia dalam pendidikan dapat diperkuat dan ditingkatkan di Indonesia, sehingga setiap individu memiliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan yang berkualitas.

### **Ketidaksetaraan Gender**

Ketidaksetaraan gender menjadi hambatan signifikan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama dalam jangka panjang, dengan penekanan akademis khusus pada pengaruh perempuan terhadap pilihan fertilitas dan investasi dalam modal manusia (Arsani et al., 2023). Selain itu, disparitas gender dapat muncul secara independen dari diskriminasi antar-grup, berasal dari perbedaan dalam bagaimana individu, yang dikategorikan sebagai mirip laki-laki atau mirip perempuan, bereaksi terhadap penilaian eksternal terhadap harga diri mereka (Amalia & von Korfflesch, 2021). Akibatnya, ketidaksetaraan gender tidak hanya menghambat kemajuan ekonomi jangka panjang, tetapi juga menegaskan pentingnya peran perempuan dalam keputusan fertilitas dan investasi dalam modal manusia, sambil menyoroati potensi adanya disparitas berdasarkan respons yang berbeda terhadap persepsi masyarakat tentang penilaian harga diri, terlepas dari diskriminasi antar-grup.

Penilaian atas ketidaksetaraan gender, yang mencakup aspek seperti kompetensi pendapatan, berkorelasi dengan insiden pembunuhan gender-spesifik di berbagai negara (Rogers et al., 2020: 101). Selain itu, di India, disparitas gender secara signifikan memengaruhi kemampuan kognitif pada masa tua, dengan perempuan di negara bagian yang ditandai oleh diskriminasi tinggi, seperti Bihar, menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, dengan asosiasi ditemukan dalam pendidikan, pernikahan dini, keterlibatan dalam pasar tenaga kerja, dan keterlibatan dalam aktivitas sosial (Lee et al., 2020: 659). Oleh karena itu, ketidaksetaraan gender, yang diukur dengan metrik seperti kompetensi pendapatan, terkait dengan kejadian pembunuhan gender-spesifik secara global, sementara di India, hal ini secara signifikan memengaruhi fungsi kognitif pada masa tua, terutama di antara perempuan yang tinggal di daerah yang ditandai oleh diskriminasi yang luas, dan berkorelasi dengan berbagai faktor sosial-ekonomi, termasuk pencapaian pendidikan, pernikahan dini, partisipasi dalam

pasar tenaga kerja, dan keterlibatan dalam interaksi sosial. Kesenjangan gender dalam pendidikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, sementara kehadiran perempuan di parlemen menunjukkan hubungan positif dengan pertumbuhan di semua negara berkembang, tetapi hubungan negatif di negara-negara di Afrika sub-Sahara (Amaia Altuzarra et al., 2021: 2). Bab ini menyediakan istilah dan kerangka kerja kunci untuk memahami ketidaksetaraan gender, menekankan pentingnya lensa feminis dalam upaya keadilan sosial. (A.M. Bibeau et al., 2020: 8). Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan merujuk pada perbedaan perlakuan, akses, dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Meskipun prinsip kesetaraan gender diakui secara luas, masih terdapat berbagai hambatan dan diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk meraih potensi penuh mereka dalam dunia pendidikan. Akses pendidikan bagi perempuan seringkali menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah dengan budaya yang masih patriarkis atau di mana norma-norma sosial menempatkan perempuan dalam peran yang terbatas. Faktor-faktor seperti kemiskinan, jarak geografis, praktik pernikahan dini, dan stereotip gender dapat menghambat perempuan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO (2020). Disparitas gender dalam kesempatan pendidikan mencakup berbagai aspek, termasuk: Akses ke sekolah, Perempuan seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses sekolah, terutama pada tingkat sekolah menengah dan tinggi. 2) Ketersediaan fasilitas: Sekolah-sekolah di daerah pedesaan atau terpencil seringkali kurang menyediakan fasilitas yang memadai bagi perempuan, seperti toilet yang aman dan privasi yang memadai. 3) Peran dan harapan sosial: Norma-norma sosial yang menempatkan perempuan dalam peran rumah tangga dan merawat anak dapat mengurangi kesempatan mereka untuk mengejar pendidikan lebih lanjut. Upaya Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan, pendidikan memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan. Beberapa upaya untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan antara lain: 1) Kampanye Kesadaran: Kampanye-kampanye yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi perempuan dan mengatasi stereotip gender. 2) Program beasiswa, Program beasiswa khusus untuk perempuan dapat membantu meningkatkan akses mereka ke pendidikan tinggi. 3) Pelatihan Keterampilan: Pelatihan keterampilan dan pendidikan nonformal dapat

membantu perempuan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi mereka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Isu-isu Lain yang Terkait dengan Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan: Selain akses dan kesempatan, terdapat isu-isu lain yang terkait dengan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, seperti: 1) Kekerasan Gender: Kekerasan terhadap perempuan dan gadis, termasuk pelecehan seksual di sekolah, dapat menjadi hambatan serius dalam pendidikan mereka. 2)

Kurangnya Perwakilan: Kurangnya perwakilan perempuan dalam bidang-bidang studi tertentu, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat membatasi pilihan karier perempuan di masa depan. 3) Perlakuan Diskriminatif: Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dalam proses pendidikan, seperti pemilihan kurikulum yang berorientasi pada stereotip gender, juga merupakan isu yang perlu diperhatikan, Mahajan, G., & Lahoti, R. (Eds.). (2020). Dengan mengatasi berbagai isu dan hambatan terkait dengan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, diharapkan perempuan dapat memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang berkualitas dan berkontribusi secara positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Salah satu contoh program pendidikan yang sukses adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia. PAUD merupakan bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pendidikan awal bagi anak-anak usia dini untuk mempersiapkan mereka secara optimal dalam memasuki pendidikan dasar. Studi menunjukkan bahwa PAUD yang berkualitas dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan kognitif, sosial, emosional, dan motorik anak-anak, Kemdikbudristek (2020). Tindakan yang Efektif dalam Mengatasi Tantangan Pendidikan, Isu HAM, dan Ketidaksetaraan Gender: 1) Penguatan akses pendidikan bagi semua individu, termasuk perempuan dan kelompok minoritas. 2) Peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru, peningkatan fasilitas pendidikan, dan reformasi kurikulum. 3) Pengembangan program-program pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, seperti pelatihan keterampilan dan program beasiswa khusus 4) Implementasi kebijakan dan program-program perlindungan HAM di lingkungan pendidikan, termasuk pencegahan kekerasan dan diskriminasi. 5) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan dan HAM melalui kampanye kesadaran dan advokasi, UNICEF (2019).

## KESIMPULAN

Isu-isu seperti ketidaksetaraan gender, tantangan pendidikan, dan hak asasi manusia (HAM) menjadi fokus utama untuk diperhatikan. Dari uraian sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun telah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah ini, masih terdapat banyak tantangan yang perlu dihadapi. Ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan, disparitas kualitas dalam sistem pendidikan, dan pelanggaran terhadap HAM masih menjadi isu yang relevan dan perlu mendapatkan perhatian serius. Dengan demikian, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, untuk mengatasi tantangan ini. Langkah-langkah strategis seperti pembentukan kebijakan yang inklusif, peningkatan investasi dalam pendidikan yang berkualitas untuk semua, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran HAM dapat membantu memperbaiki situasi. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan advokasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan dan perlindungan HAM, sehingga masyarakat dapat bersama-sama bergerak menuju pembangunan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan..

## DAFTAR PUSTAKA

- Altuzarra, A. (2021). Is Gender Inequality a Barrier to Economic Growth? A Panel Data Analysis of Developing Countries.
- Amalia, R. T., & von Korfflesch, H. F. O. (2021). Entrepreneurship education in Indonesian higher education: mapping literature from the Country's perspective. In *Entrepreneurship Education* (Vol. 4, Issue 3). Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/s41959-021-00053-9>
- Arsani, A. M., Kataoka, M., & Fahmi, M. (2023). Ethnicity and the return to education in Indonesia. *Journal of Socioeconomics and Development*, 6(1), 6–20.
- Ashar Hasanuddin. (2021). Assessing The National Human Rights Commission's (Komnas

- Ham) Independence In Indonesia's Statement System. *Jurnal Al Tasyri'Iyyah*, 1(2), 75–85. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.28536>
- Bramantyo, R. Y., Rahman, I., & Windradi, F. (2023). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 38. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.355>
- Dahris Siregar, Grassela E Br Ginting, Hadirin Nduru, Sri Wenti Buulolo, Firman Yanus Hulu, Agustus Nduru, Indrawan Jaya Zalukhu, Sonitehe Halawa, Water Ade Putra, & Jeremia G Aritonang. (2023). Law Enforcement of Human Rights (HAM) in Indonesia. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(3), 389–395. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i3.387>
- Ferdinan Manuel, E. (2021). Law Riview Keindependensian Komnas HAM (the fourth branch of the government); Perspektif Pancasila, Konstitusi, dan Budaya. *PUSKAPSI Law Review*, 1(2), 146. <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v1i2.27036>
- Hasdiana, U. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Hawa, N. N., Zakaria, S. Z. S., Razman, M. R., & Majid, N. A. (2021). Geography education for promoting sustainability in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 13(8), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su13084340>
- Huet, S., Gargiulo, F., & Pratto, F. (2020). Erratum: Can gender inequality be created without inter-group discrimination? (*PLoS ONE* (2020) 15:8 (e0236840) DOI: 10.1371/journal.pone.0236840). *PLoS ONE*, 15(12 December), 244926. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244926>
- Li (Michael), Z., & Wong, K. K. (2023). Challenges and Opportunities: Dance Education in the Digital Era. *Lecture Notes in Educational Technology*, 1(4), 29–48.

[https://doi.org/10.1007/978-981-19-9315-2\\_2](https://doi.org/10.1007/978-981-19-9315-2_2)

- Liu, C., Blinka, M., Fabius, C., & Howard, V. (2020). Session 5935 ( Symposium ). 4, 659–660.
- Morfi, R. F., Arfiani, A., & Amsari, F. (2023). Efektifitas Pemberian Hasil Rekomendasi Penyelidikan Komnas HAM Terhadap Dugaan Pelanggaran HAM Kepada Lembaga Negara. *Lareh Law Review*, 1(1), 34–46. <https://doi.org/10.25077/llr.1.1.34-46.2023>
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of Pluralism Education in Indonesia: A Qualitative Study. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106–120. <https://doi.org/10.29333/ejecs/1207>
- Prakoso, A. F., Andriansyah, E. H., Rafsanjani, M. A., Nurlaili, E. I., & Arif, A. (2023). Education in Indonesia (Merdeka Curriculum) and Japan Curriculum : What's the Difference? *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 9(1), 162. <https://doi.org/10.33394/jk.v9i1.6992>
- Septiono, A. (2023). Reformulation of the Institutional Functions and Authorities of the National Commission on Human Rights. *Journal Philosophy of Law*, 3(7), 74. <https://doi.org/10.56444/jpl.v3i7.4212>
- Shudueva, Z., Budnikov, D., & Akhmadov, A. (2023). Problems and opportunities for introducing educational technologies for the sustainable development of the quality of education. *E3S Web of Conferences*, 451. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345106010>
- Sibarani, S., & Sinamo, N. (2020). Implementation of Educational Policy in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2020, 433–440. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7900>
- Sulton, I. M. D. & A. (2020). *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*. 4(2), 192–201.
- Syahputra Al Idrus, Y., Rusadi Abdullah, I., & Dwi Cahyani, T. (2023). Efektifitas Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat ASEAN Oleh Asean Intern-Governmental Commision On Human Rights (AICHR). *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 2(11), 2835–2847. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i11.689>